

ETIKA GLOBAL

GUNA MENGENDALIKAN KAPITALISME GLOBAL

Febry Ferdinan Laleno¹

Abstract

The picture of world economy is increasingly leading to global capitalism that has been considered as an ideal. Capitalism makes entrepreneurs have the same chance and freedom to optimizing their business in free competition and market mechanism. Through this way, they expect that prosperity can be realized. This idealized image becomes gloomy as the world is still colored by the ongoing economic crisis in this modern era and the facts show that there are still many people in the world who are living in poverty, unemployment, hunger, and the threat of ecosystem destruction. In this context, ethics is the answer to human needs. Global Ethics according to Hans Küng brings full human values, commitment to life, fair economic order, culture of tolerance, and cooperation among humans. Global Ethics can be a first step for entrepreneurs and policy makers to create a culture of positive economic. The effort to realize a more humane global order should be enforced based on a commitment to a fundamental consensus. This consensus contains the outlines of the new paradigma of economic ethics which can manage global capitalism to obtain an economic policy that can serve all mankind for the sustainable future of the world.

Key Words: Kapitalisme, Etika Global, Globalisasi, Ekonomi Pasar, konsensus fundamental, martabat manusia.

Pengantar

Kapitalisme muncul sebagai respon terhadap semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan peradaban manusia dalam berbagai bidang pada zaman modernisme telah menghasilkan banyak ide dan upaya baru yang semuanya ingin bermuara pada kesejahteraan manusia. Sistem kapitalisme hadir untuk memperlakukan kegiatan ekonomi dengan cara baru dan meninggalkan sistem tradisional yang dianggap

¹ Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Teologi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung.

tidak memadai. Weber menyebut kapitalisme sebagai organisasi rasional.² rasional digunakan oleh Weber sebagai suatu seni yang dipakai untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada kebiasaan dan tradisi namun pada penyesuaian sarana-sarana ekonomi yang sistematis dan cermat menuju pencapaian dari tujuan-tujuan dalam rangka memperoleh profit (keuntungan) keuangan.³ Keuntungan ini haruslah berkelanjutan dan didukung oleh perhitungan dan sistem produksi yang rasional dan optimum. Sebagai pelopor sistem ekonomi kapitalis, Adam Smith (1723-1790) memberikan perhatian pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi individu yang merupakan tahapan awal bagi pemenuhan kebutuhan publik atau sosial. Interaksi ini akan menguntungkan semua pihak karena mengejar pemenuhan kepentingan pribadi tidak selalu berakibat buruk bagi orang lain melainkan justru memajukan kepentingan masyarakat secara lebih efektif.

Dalam perkembangannya, kapitalisme mampu menjelma menjadi satu pola pikir global yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju sebagian besar menggunakan kapitalisme sebagai sistem ekonomi. Prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi - 'pasar bebas' - telah menyebar, dan telah berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya, serta keduanya (bersama dengan demokrasi liberal) terjadi di negara-negara industri dan negara-negara berkembang, yang menjelang Perang Dunia II masih merupakan negara-negara Dunia Ketiga yang sangat miskin.⁴ Kapitalisme semakin mencengkram dunia dengan pengaruhnya yang seakan-akan tidak dapat dibendung. Kemenangannya terhadap kekuatan besar sosialisme di kancah global telah membuatnya percaya diri sebagai suatu sistem ekonomi yang ideal.

Kemenangan ini ternyata belum sepenuhnya menangkis berbagai krisis ekonomi dunia yang banyak membawa bencana kemanusiaan. Sistem ini mulai banyak dipertanyakan keampuhannya pascakrisis ekonomi global yang menjangkiti negara-negara yang menganut sistem

² Donald A. Hansen, *An invitation to Critical Sociology* (New York: The Free Press, 1976), 146.

³ R.H. Tawney, *Max Weber: Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus, 2015), 11.

⁴ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: The Free Press, 1992), xiii.

ini. Belum genap satu dasawarsa, dunia masih berada dalam krisis ekonomi global. Sebut saja bencana ekonomi yang terjadi di Yunani, Venezuela dan Brazil yang telah mengalami resesi dan menimbulkan permasalahan sosial. Kesenjangan ekonomi pun mulai terpapar jelas antara yang kaya dan miskin. Dalam temuan lembaga independen Oxfam International pada Januari 2016 menemukan bahwa 62 orang terkaya di dunia memiliki jumlah kekayaan setara dengan kekayaan milik setengah dari populasi penduduk dunia.⁵ Apabila penduduk di suatu wilayah memiliki ketimpangan pendapatan yang besar, maka meningkat pula angka kesenjangan sosial dan kriminalitas. Hal inilah yang menurut Schumpeter disebut sebagai 'ketidaksabaran moral' kaum miskin oleh karena "inequality" yang mencolok.⁶ Berbagai gejala ini memunculkan berbagai aksi protes di beberapa belahan dunia termasuk Amerika Serikat dengan gerakan anti-Wall Street-nya yang ingin membuktikan bahwa sistem kapitalisme yang dianut negaranya dan sebagian negara Eropa bukanlah sistem yang menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi sebuah sistem yang hanya menguntungkan korporasi dan para pemilik modal. Mereka menuntut agar sistem perekonomian harus diperbaharui untuk kepentingan umat manusia, dan bukan untuk kepentingan korporasi belaka.

Globalisasi Ekonomi

Masalah ekonomi domestik yang terjadi dalam suatu negara tentu saja akan membawa dampak yang lebih luas. Dalam era globalisasi, semua negara akan saling terkait satu dengan yang lain sehingga kesulitan atau krisis yang dialami oleh suatu negara akan berdampak pula bagi negara-negara lain. Krisis ekonomi yang meluas ini terjadi sejalan dengan semakin terintegrasinya perekonomian di era globalisasi. Krisis keuangan yang terjadi pada suatu negara dapat dengan mudah menyebar ke negara-negara lain dan menjadi bencana keuangan global dalam kurun waktu yang singkat. Sejak era globalisasi, krisis ekonomi menjadi lebih kerap terjadi daripada sebelumnya. Salah satu penyebab utama adalah kemajuan dalam bidang teknologi

⁵ Oxfam International, *62 people own the same as half the world, reveals Oxfam Davos report*, 18 Januari 2016. <https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report> (1 September 2016).

⁶ Agus Rahmat Widiyanto, "Schumpeter: Kapitalisme sebagai Proses Penciptaan dan Pemunahan", *Melintas* No. 39 - Desember (1996), 15.

informasi yang memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke daerah atau negara lain. Krisis ekonomi yang meluas ini terjadi sejalan dengan semakin terintegrasinya perekonomian di era globalisasi.

Anthony Giddens menyebut Globalisasi sebagai peningkatan ketergantungan di antara manusia, wilayah, dan negara-negara di dunia dalam hubungan sosial dan ekonomi.⁷ Globalisasi ekonomi oleh Hans Küng disebut sebagai proses penciptaan pasar dan produksi di berbagai negara yang membuat satu negara dengan negara yang lain saling terkait dan saling bergantung sebagai akibat dari dinamika perdagangan barang dan jasa, gerak kapital dan teknologi.⁸ Dalam era ini, ekonomi dunia telah tumbuh bersama dan membentuk sebuah jaringan. Proses ekonomi berjalan sesuai dengan mekanisme pasar dan intervensi negara sedapat mungkin diminimalisasi sehingga pertukaran barang dan modal dapat dengan bebas terjadi dalam lingkup yang lebih luas di seluruh dunia. Bahkan Cina dan negara bekas Blok Soviet yang dulu tertutup, saat ini telah membuka dirinya luas-luas, seakan-akan tidak mau tertinggal dalam percaturan ekonomi dunia. Arus barang, jasa, dan modal di dunia bergerak secara dinamis dan berbagai hambatan seperti proteksionisme perdagangan, larangan investasi serta regulasi moneter yang mengekang arus tersebut semakin berkurang. Tentu saja hal ini akan semakin mempertajam persaingan yang dapat menimbulkan permasalahan domestik suatu negara. Di lain pihak, situasi ini menjadi sebuah peluang yang dapat menunjang keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Pada perkembangannya, proses globalisasi dewasa ini telah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan di segala bidang baik ekonomi, bisnis, budaya, politik, maupun ideologi.⁹

Hans Küng memandang globalisasi sebagai sebuah keniscayaan yang merupakan hasil dari perkembangan geliat ekonomi dan teknologi modern.¹⁰ Peralatan komunikasi dan transportasi yang canggih, serta

⁷ Anthony Giddens, *Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 2001), 690.

⁸ Hans Küng, *A Global Ethic for Global Politics and Economics* (New York: Oxford University Press, Inc., 1997), 273

⁹ Faisal H. Basri, "Globalisasi dan Tantangan Dunia Usaha", Mohammad Ikhsan, Chris Maining, Hadi, Soesastro (Ed.), *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 366.

¹⁰ Hans Küng, 160.

diikuti dengan perputaran arus barang data global, bursa saham secara elektronik semakin menunjukkan bahwa transisi dari ekonomi nasional ke ekonomi global benar-benar terjadi dalam tempo yang singkat. Usaha untuk menghentikan atau bahkan membalikkan transformasi yang revolusioner ini seakan-akan mustahil. Suatu hal yang sulit bagi sebuah bangsa untuk tidak ikut terlibat dalam proses globalisasi ini. Suatu negara yang tidak tergabung, menurut Kung secara *a priori* akan merendahkan dirinya sendiri.¹¹ Negara berkembang dan negara yang ada di ambang industri juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk mencapai pertumbuhan yang sama dengan negara maju. Situasi ini tidak serta membuat segalanya menjadi mudah. Para pelaku bisnis kini tidak terlalu berani memprediksi dengan pasti negara mana yang akan berhasil dalam jangka panjang atau perusahaan mana yang akan dapat terus bertahan di masa mendatang. Hal ini juga berlaku dengan beberapa mata uang dunia yang tidak dapat diramalkan kinerjanya. Segala bentuk ramalan yang diperoleh melalui tren statistik ekonomi kini terkait dengan faktor yang lain seperti stabilitas kondisi sosial dan situasi politik di suatu kawasan.

Layaknya pedang bermata dua, globalisasi di satu sisi membawa banyak keuntungan dan kemudahan, namun di sisi yang lain juga membawa dampak negatif bagi kehidupan suatu bangsa. Contoh hal positif dari globalisasi yang dapat kita nikmati adalah semakin mudahnya mendapati barang dan jasa dengan harga yang kompetitif, sesuai dengan selera, dan lebih cepat. Negara berkembang pun dapat menggunakan kesempatan ini dengan menyuplai barang-barang yang dapat membantu perekonomiannya. Hal positif ini ternyata menyimpan potensi konsekuensi sebaliknya yang diantaranya berdampak pada dilanggarnya martabat kerja manusia seperti munculnya kasus eksploitasi tenaga kerja murah. Manusia pekerja juga ditarik dalam suatu kepanikan akibat ketidakpastian dan cepatnya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersikap adaptif dengan cara apapun untuk memenuhi tuntutan pasar sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan perubahan kultural serta struktural secara radikal dalam tataran organisasinya. Rasionalisasi pegawai dan penanaman kebiasaan asing pun menjadi hal yang biasa demi tercapainya tujuan organisasi. Perubahan-perubahan ini terkadang tidak dapat diikuti oleh sebagian orang sehingga siapapun yang tidak bertahan akan terseleksi dengan sendirinya dan apabila ada yang

¹¹ *Ibid.*

sanggup bertahan, ia akan membawa dampak beban psikologis yang tidak ringan. Semua dibawa dalam hiruk pikuk geliat persaingan yang semakin ketat. Semua pihak yang tidak mampu ikut dalam arus ini akan tereliminasi dengan sendirinya. Manusia hanya dilihat sebagai mesin-mesin produksi yang siap berproduksi dan apabila mulai usang, harga manusia pun juga ikut turun bahkan dianggap sebagai beban bagi yang lain. Di bidang ekologi, mulai muncul kerusakan alam yang mengancam kelangsungan hidup seluruh penghuni bumi dengan geliat aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun fenomena globalisasi tidak dapat terhindarkan, namun kegagalan yang ditimbulkan menumbuhkan kebutuhan untuk melakukan manuver guna mengendalikannya baik oleh pemerintah, para pelaku bisnis maupun komunitas regional yang lebih luas melalui penciptaan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini perlu diwaspadai karena ketegangan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan berlanjut pada konflik sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, banyak para pemikir mulai mencari cara untuk memulihkan keadaan manusia yang dirasa tidak lagi manusiawi dengan sistem yang membelenggu mereka, terutama yang dirasakan oleh pihak yang lemah dan tidak memiliki pengaruh yang kuat. Dari tingkat makro mulai muncul usaha untuk menyusun suatu bentuk sistem ekonomi yang dirasa ampuh mengatasi kapitalisme. Sebut saja usaha dari pemerintah di berbagai negara untuk mengusung suatu sistem ekonomi pasar sosial yang mengikutsertakan peran pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan perekonomian. Usaha ini juga dilakukan oleh para pemuka agama yang mulai menyerukan bahaya kapitalisme. Kalangan Islam semakin gencar mempromosikan suatu sistem ekonomi syariah ganti kapitalisme yang diyakini akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Gereja Katolik juga tidak henti-hentinya mengeluarkan ensiklik yang menyerukan bahayanya sistem kapitalisme. Paus Fransiskus bahkan menyebut sistem ini sebagai pembunuh dalam ensikliknya.¹² Beberapa Ajaran Sosial Gereja dari masa ke masa juga dengan setianya mengeluarkan himbuan ini, meski Gereja tidak dengan tegas untuk memilih suatu sistem ekonomi tertentu untuk dianut oleh setiap negara.

¹² *Evangelii Gaudium*, 53.

Etika dan Ekonomi Global

Melalui globalisasi dan kemajuan teknologi, pelaku ekonomi digiring masuk dalam suatu era pasar bebas yang dibalut dengan semangat kapitalisme. Wajah ekonomi dunia diwarnai dengan semakin derasnya aliran kapital dan tenaga kerja yang melampaui batas negara. Dalam suasana ini akan muncul atmosfer kompetisi yang semakin sengit antarperusahaan, daerah atau wilayah. Suasana ini juga memunculkan suasana tidak ramah, tidak manusiawi karena ada perlombaan untuk mencapai keuntungan dan produktivitas yang lebih tinggi. Etika tidak hendak masuk dalam ranah teknis atau menjadi wasit yang mengajarkan ilmu ekonomi kepada para ahli ekonomi. Perhatian Küng tidak pada hal-hal detail tetapi mengarah pada garis-garis besar yang mendasar dan diharapkan dapat meyakinkan para ahli ekonomi dan politisi bahwa etika dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Schumacher mengatakan interdependensi ekonomis di antara negara-negara perlulah diimbangi dengan interdependensi moral, agar tercapailah keadilan global di muka bumi.¹³ Inilah faktor yang harus diperhatikan agar kegiatan ekonomi menjadi makin manusiawi. Solusi bagi bencana kemanusiaan seperti kemiskinan dan ketidakadilan yang menimpa negara-negara miskin, tidak lagi diserahkan hanya kepada negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tanggung jawab global. Kesejahteraan dan keadilan global dapat diciptakan oleh keharmonisan berbagai kepentingan ekonomi yang selalu memperhatikan nilai-nilai etis yang dianut secara global. Perilaku ini akan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap nasib masyarakat dunia.

Küng mengajak para pelaku ekonomi untuk merenungkan bahwa aktivitas ekonomi diadakan untuk manusia sehingga martabat manusia menjadi prioritas pertama dan bukan pada skala indikator pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tata ekonomi dunia harus merumuskan suatu etika yang sesuai.

Dunia Membutuhkan Etika Global

Hans Küng sebagai pendiri *Global Ethic Foundation* Tübingen-Jerman dan yang pernah menjadi presiden dari *The Council Parliament of*

¹³ Agustinus Rachmat Widiyanto, "Titik Sentuh Ekonomi dan Etika", *Oratio Dies Natalis XXXVII Universitas Katolik Parahyangan*-Januari 1992 (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1992), 4.

the World's Religions, hendak menawarkan sebuah solusi demi terwujudnya tatanan dunia yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab. Küng menguraikan garis-garis besar paradigma baru etika ekonomi yang dapat mengendalikan laju kapitalisme global sehingga diperoleh suatu kebijakan ekonomi yang dapat melayani umat manusia secara keseluruhan. Menurutnya kepentingan ekonomi tidak boleh melebihi tuntutan fundamental dari alasan etis. Etika ini bersifat global karena segala permasalahan ekonomi yang terjadi dewasa ini tidak lagi menyangkut masalah domestik suatu negara melainkan sudah bersifat multinasional. Maka akan menjadi lebih mudah apabila setiap negara memandang diri mereka saling terikat satu sama lain dan termotivasi oleh komitmen bersama sehingga kerjasama antarbangsa dari berbagai kultur dan kepentingan dapat lebih mudah terbentuk dan dapat mengurangi konflik yang mungkin terjadi di antara bangsa-bangsa.

Küng meyakini etika global akan mampu menyatukan tujuan bersama dari kelompok-kelompok yang berbeda sehingga tercipta suatu tatanan dunia yang lebih baik. Keyakinan ini dapat terwujud apabila muncul kepercayaan dan penghargaan terhadap berbagai macam nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Dengan kata lain, situasi ini dapat terwujud apabila tidak ada dominasi dalam memandang mereka yang lain (*the other*). Pandangan ini selaras dengan pemikiran transmodernisme¹⁴ yang beranjak dari situasi dominasi karena senantiasa menekankan hubungan yang simetri di antara semua pihak dan duduk bersama untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan hidup bersama. Setiap argumen seseorang harus didengarkan dan diperhatikan dalam formasi yang simetris dari seluruh anggota masyarakat termasuk mereka yang dianggap eksterior.¹⁵ Tidak ada yang mendominasi dalam skema ini karena transmodernisme tidak mengusung suatu piramida kebenaran, tetapi lebih menempatkan mereka dalam suatu meja bundar yang dapat diduduki bersama oleh berbagai pihak dan mempromosikan kesetaraan

¹⁴ Transmodernisme menurut Dussel adalah suatu paham yang menentang metanaratif dalam modernisme. Apabila dihasilkan suatu metanaratif, maka transmodernisme menawarkan suatu metanaratif yang memiliki jangkauan lebih luas daripada modernisme yang bersifat eksklusif Eropasentris karena didasarkan pada referensi yang lebih beragam dari banyak unsur.

¹⁵ Bdk. Enrique Dussel, *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion* (London: Duke University Press, 2013), 151.

tanpa label superior-inferior, mayoritas-minoritas dan berbagai skala dominasi lainnya.

Dominasi dalam aspek ekonomi tampak dalam mekanisme pasar yang ingin mengatasi atau mendominasi segala regulasi yang mengatur pergerakan mereka seperti yang terkandung dalam istilah *laissez-faire*. Pasar sejatinya adalah bagian dari hidup manusia sebagai tempat pertukaran, perjumpaan dan perwujudan aktualisasi manusia. Namun, pasar menjadi keliru ketika ia bersifat dominan dan absolut karena dianggap sebagai hukum universal dan harus bebas dari pengaruh apapun. Proses ini pada akhirnya membawa korporasi menjadi pihak yang memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan ekonomi dan juga mengubah nilai sosial.¹⁶ Korporasi yang 'bermain mata' dengan pihak pemerintah justru memperparah kondisi ini sehingga kelas kapitalis akan mendominasi, baik secara ekonomi, politis, dan budaya. Dasar dari dominasi ini adalah kepemilikan dari sumber daya produktif dalam masyarakat yang pada akhirnya memiliki kekuasaan untuk membentuk dan mengarahkan seluruh proses ketenagakerjaan.¹⁷ Semua ini dalam rangka memastikan berhasilnya proses produksi dari para kapitalis dan untuk mengakumulasi modal dan keuntungan, serta pada saat yang sama dengan pengaruhnya, mereproduksi institusi politik dan kultural yang menguntungkan bagi mereka.¹⁸

Etika global yang diusung oleh Küng dilihat sebagai konsensus dasar (*fundamental consensus*) yang memadukan nilai-nilai standar dan prinsip-prinsip yang mendasar.¹⁹ Tanpa adanya konsensus dasar ini, maka masyarakat di manapun cepat atau lambat akan terancam oleh kekacauan dan kediktatoran. Tidak mungkin ada tatanan global yang baik tanpa etika global.²⁰ Dengan demikian, etika global berusaha

¹⁶ Tom Bottomore & Robert J. Brym, *The Capitalist Class: An International Study*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1989), 9.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, 12

¹⁹ Hans Küng dan Karl Joseph Kuschel, *A Global Ethic - The Declaration of The Parliament of The World's Religions* (London: SCM Press Ltd., 1993). 5. Deklarasi ini juga bisa diakses di situs https://parliamentofreligions.org/pwr_resources/_includes/FCKcontent/File/TowardsAGlobalEthic.pdf.

²⁰ *Ibid*, 7.

menekankan etika minimal yang secara absolut dibutuhkan untuk kelestarian umat manusia dan lingkungannya.

Konsensus Fundamental (*fundamental consensus*)

Bahaya global yang mengancam kehidupan manusia menurut Küng dapat diatasi melalui etika yang digali dari berbagai macam sumber termasuk dari ajaran-ajaran agama maupun kearifan lokal yang telah lama dianut oleh komunitas-komunitas tertentu. Meskipun tidak langsung memberikan solusi, namun etika ini memberikan dasar moral bagi individu maupun masyarakat global yang lebih baik. Segala sumber daya ekonomi, budaya, dan spiritual seharusnya menjadi potensi untuk membangun tatanan global yang lebih baik. Dalam situasi global, umat manusia memerlukan visi tentang hidup bersama secara damai sebagai satu keluarga umat manusia di bumi. Etika global di sini bukanlah suatu ideologi global atau penyatuan agama, tetapi merupakan konsensus fundamental tentang nilai yang mengikat, standar yang tidak bisa diganggu gugat, dan sikap personal.²¹ Pendasaran kebenaran yang hanya diserahkan kepada tingkat lokal atau partikular akan sulit untuk melakukan penilaian atasnya sehingga tidak ada batasan yang jelas dan menimbulkan kondisi yang membingungkan, termasuk dalam masalah moral. Konsensus fundamental ini dihasilkan dari hubungan yang lebih luas dan bahkan relasi global di antara elemen-elemen lokal yang ada, serta tidak hanya berdiri pada konsep lokal yang diabsolutkan. Konsensus ini memiliki karakter yang plural dan tidak bersifat eksklusif dan hirarkis serta berisi tuntutan fundamental dari etika global yang menghormati keluhuran martabat manusia. Setiap manusia - tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, kemampuan fisik atau mental, bahasa, agama, pandangan politik, latar belakang sosial atau nasional - memiliki keagungan martabat yang asasi dan tidak dapat diganggu gugat.

Etika Global Dalam Kebijakan Ekonomi Global

Dalam tradisi ilmiah disebutkan bahwa pada awalnya terdapat hubungan erat dan mutlak antara etika dan ekonomi. Hingga akhir abad

²¹ Ibid, 21.

kesembilan belas, ekonomi adalah bagian dari filsafat moral.²² Hal ini tampak jelas ketika kasus pengupahan buruh, pekerja kontrak, ataupun masalah eksploitasi lingkungan akan memunculkan pertanyaan moral tentang tanggung jawab para pelaku kegiatan ekonomi.

Berhadapan dengan kapitalisme global, komunitas dunia perlu melakukan refleksi yang kritis tentang jenis ekonomi pasar macam apakah yang perlu dikembangkan dalam setiap komunitas lokal tanpa menutup mata pada prinsip-prinsip etis yang harus dipenuhi dalam relasinya dengan warga dunia yang lain. Refleksi etis ini menunjukkan kepada manusia suatu kebutuhan untuk mempertemukan dirinya kepada budaya, kelas, dan kelompok rasial yang lain.²³ Hans Küng menyebutkan empat pandangannya terkait dengan kebijakan ekonomi global yang akan menjadi dasar dibutuhkanannya etika global dalam bidang ekonomi.

Tidak Boleh Ada Imperialisme Ekonomi

Para teoretisi ekonomi dan sosial dari Eropa klasik maupun pendiri ekonomi modern dan filsafat moral Adam Smith, tidak mengemukakan pandangan ekonomi yang sempit, tetapi juga melihat ekonomi dalam konteks sosial dan etika. Meskipun demikian masih terjadi imperialisme ekonomi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak sebatas teori, tetapi imperialisme ini juga menjalar ke ranah praktik. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi telah menjelma sebagai 'penguasa' dengan sifatnya yang mengusung nilai-nilai rasionalitas, menihilkan konteks sosial dan etika. Banyak ekonom yang juga mencermati hal yang sama seperti Paul Ulrich, Guru Besar pertama bidang Etika Bisnis di St. Gallen Hochschule. Ia memberikan refleksi kritis tentang perlunya fondasi normatif dari konsep rasionalitas ekonomi dan mengusulkan etika bisnis yang komprehensif.²⁴ Penekanan fundamental yang diberikan oleh Küng ialah agar kepentingan ekonomi tidak boleh menguasai segala sesuatu. Dinamika rasionalisasi sistem ekonomi tak jarang terus memaksakan argumen dan logikanya sendiri.

²² Agus Rahmat Widiyanto, "Landasan Etis Kegiatan Ekonomi" *Melintas* No. 64 : April – Agustus 2005 (Bandung: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, 2005). 48.

²³ Charles L. Kammer, *Ethics and Liberation: An Introduction* (New York: Orbis Books, 1988), 30.

²⁴ Hans Küng, 209.

Manusia tidak hanya dilihat sebagai *homo economicus* yang memiliki lima ciri antropologis, yaitu atomistik, liberal, utilitarian, produktif, dan rasional. Kelimanya telah membentuk *the enterprise culture*, budaya dunia usaha yang menopang kapitalisme global.²⁵ *Homo economicus* hanyalah sebuah model dan bukan pribadi yang riil. Antropologi dan psikologi perkembangan pada masa sekarang justru menegaskan bahwa sejak permulaan, manusia pada dasarnya adalah *animal sociale* yaitu makhluk sosial yang dapat mencapai individualitas dan identitas personalnya hanya melalui interaksi dan integrasi sosial yang konstan.²⁶ Kesempurnaan seorang manusia justru dibentuk oleh realisasi sosial yang apabila hal ini disangkal, dapat menjadi penyebab segala permasalahan bagi seluruh makhluk.²⁷ Melalui proses interaksi dan integrasi dalam sistem sosial, seorang anak manusia dapat belajar berbicara dan berperilaku secara manusiawi.

Dalam hal pertukaran pun, pada awalnya manusia tidak memiliki motivasi ekonomi. Tidak setiap pertukaran adalah pertukaran pasar dan tidak pula dilakukan dengan tujuan ekonomi. Pertukaran dapat berarti sarana komunikasi, sebagai tanda saling pengertian dan kesiapan untuk perdamaian.²⁸ Berhadapan dengan supremasi motivasi ekonomi, Küng menggarisbawahi lima hal berikut ini: (1) Manusia tidak hanya bertindak menurut dalil rasional yang ekonomis, (2) Prestasi manusia tidak hanya diatur oleh kepentingan material dan dorongan manusia tidak hanya untuk bertukar, (3) Tidak semua manusia dapat dipuaskan dengan apa yang dapat dihasilkan oleh ekonomi, (4) Tidak akan berguna apabila setiap orang mengejar kepentingannya sendiri, (5) Manusia (termasuk para ekonom) di manapun selalu membutuhkan lebih dari sekedar ekonomi pasar demi kemakmuran, kebahagiaan dan kesenangan hidup. Imperialisme ini sungguh nyata ketika sistem ekonomi pasar yang merupakan sistem ekonomi yang berasal dari luar dipaksakan masuk dalam hidup masyarakat lokal. Pasar ingin mengatasi atau mendominasi segala regulasi yang terkandung dalam cita-cita *laissez-faire*. Berkaitan dengan kapitalisme yang dipengaruhi oleh pengaruh asing dan yang mendominasi sistem ekonomi dunia,

²⁵ Agus Rahmat Widiyanto, 'Landasan Etis Kegiatan Ekonomi', 51.

²⁶ Hans Küng, 210.

²⁷ Niklas Luhmann, *Social System* (California: Stanford niversity Press, 1995), 211.

²⁸ Hans Küng, 210.

maka diperlukan suatu konsensus dalam suatu dialog yang tidak begitu saja menihilkan nilai-nilai kapitalisme, namun bersama dengan situasi di tingkat regional atau lokal, menemukan suatu rumusan yang mampu mempromosikan suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan motif etis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan yang mampu diaplikasikan bersama mengingat keadaan dunia yang semakin terkait satu dengan yang lain.

Ekonomi Pasar untuk Melayani Umat Manusia

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi haruslah melayani kebutuhan manusia. Demikian pula ekonomi pasar harus melayani kebutuhan orang banyak dan tidak hanya berdasar pada logika pasar. Ekonomi tidak hanya memandang keuntungan sebagai tujuan perusahaan dan mengabaikan semua tujuan lain yang ingin dicapai manusia. Ekonomi hanyalah sebuah subsistem dari masyarakat, sama dengan subsistem yang lain seperti hukum, politik, sains, kultur dan agama.²⁹ Prinsip rasionalitas ekonomi yang ada dapat dibenarkan, namun tidak boleh diabsolutkan menjadi ekonomi pasar total yang memiliki konsekuensi menghancurkan. Hal ini tampak dalam bidang politik misalnya yang tunduk pada mekanisme pasar melalui lobbi dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan, seperti yang tampak dalam gagalnya pemerintah melakukan tindakan pencegahan kenaikan harga barang pokok pada momen tertentu. Demikian juga dalam bidang hukum yang tunduk pada pasar sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak didasarkan pada martabat manusia tetapi dimanipulasi menurut logika rasionalitas ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu, seperti tampak dalam tiadanya atau kurang ditegakkannya hukum yang mengatur persaingan usaha atas nama kebebasan usaha sehingga mematikan usaha kecil dan menengah.

Küng menggarisbawahi bahwa tidak semua hal yang secara ekonomis tampak rasional membawa kebaikan bersama. Pasar dan kompetisi yang adalah sarana dan cara tidak boleh dijadikan sebagai nilai dan tujuan ekonomi tertinggi. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi hendaklah membangun suatu komunitas yang bersama-sama dengan berbagai cara berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi semua dan mengabdikan kepada seluruh masyarakat.

²⁹ *Ibid*, 211.

Keutamaan Etika Global atas Ekonomi dan Politik

Pada bagian ini Küng mengingatkan agar dalam kegiatan ekonomi global tidak terjadi Darwinisme sosial, sehingga hanya yang terkuatlah, yang akan bertahan dalam perjuangan eksistensi.³⁰ Sebaliknya, setiap individu dan kelompok harus diperlakukan secara manusiawi. Institusi ekonomi tidak boleh dibentuk atas nama kekuasaan, tetapi harus selalu bersikap adil pada martabat manusia. Küng memberikan dua premis berikut yang harus dipikirkan oleh para pelaku usaha dan pemerintah. Pertama, supremasi politik atas ekonomi. Ekonomi tidak boleh hanya berfungsi untuk melayani hasrat *homo oeconomicus* yang dianggap rasional, namun juga melayani tujuan etis dan politis, yang diekspresikan melalui tindakan tatanan politik yang berkeadilan. Kedua, memberi tempat yang utama kepada etika di atas kepentingan ekonomi dan politik. Keduanya harus ditundukkan pada kriteria etis demi umat manusia. Dengan demikian bukan ekonomi atau politik yang datang pertama, tetapi martabat manusia yang tak dapat disangkal.

Selanjutnya melalui etika ini ditarik implikasi praktis yang perlu direfleksikan oleh semua pihak, yakni: pertama, ekonomi tidak memiliki keleluasaan seakan-akan adalah hal yang natural, tetapi justru diteliti secara kritis. Kedua, otonomi ekonomi yang jelas mengarah pada dilemma etis, tidak boleh dipandang sebagai hal yang wajar dan seakan-akan tidak dapat berubah, namun harus dilihat sebagai mekanisme yang dapat diatur dan dievaluasi oleh alat politik. Ketiga, faktor-faktor ekonomi yang harus dikendalikan oleh tindakan institusional melalui produk hukum yang mampu mengarahkan mekanisme ekonomi berdasarkan etika.

Dengan demikian, diperlukan suatu refleksi di luar kepentingan nasional dalam menghadapi globalisasi dan mekanisme pasar bebas yang makin mendominasi kegiatan ekonomi internasional. Pasar dinilai semakin independen sehingga tidak ada kebijakan dunia yang mampu mengarahkannya. Fenomena yang tak terkontrol ini pada akhirnya berpotensi memunculkan kekacauan dunia yang mengarah pada krisis ekonomi yang lain. Apabila dunia masih menginginkan kompetisi global, maka harus secara konsisten pula menciptakan sebuah kerangka global bagi mekanisme pasar yang dilandaskan pada etika sehingga dinamika ekonomi dunia dapat sesuai dengan tuntutan kemanusiaan, masyarakat, lingkungan dan generasi di masa depan. Küng mengajukan

³⁰ *Ibid*, 213.

usulan-usulan berikut untuk diperbincangkan oleh ahli ekonomi dengan harapan bahwa politik masih berperan di hadapan ekonomi:

a. Penciptaan Tatanan Internasional yang Kompetitif dan Berkeadilan

Kompetisi harus bebas dari ancaman kepentingan negara tertentu beserta dengan aliansinya yang berupaya mematikan usaha kecil dan menengah suatu negara sehingga banyak negara berkembang yang akhirnya tidak dapat berperan dan terpuruk dalam percaturan dunia.

b. Hubungan yang Lebih Kuat antara Aliran Keuangan Internasional dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Menyentuh Sektor Riil

Aliran uang dan kapital hendaknya mengarah pada fungsinya yang netral sebagai alat tukar dalam perputaran barang dan jasa sehingga menggairahkan kegiatan ekonomi yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil. Prinsip ini selaras dengan pemikiran Keynes yang secara eksplisit mendedikasikan instrumen kebijakan makroekonominya pada sektor ekonomi yang riil sehingga menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan pertumbuhan produk nasional yang lebih nyata.³¹ Dihindarkan segala bentuk spekulasi perputaran uang yang tidak terkontrol sehingga menciptakan perputaran uang yang otonom dan berakibat pada fluktuasi nilai tukar uang yang ekstrem. Hal ini akan mengganggu kestabilan harga barang dan jasa dalam suatu negara. Situasi ini pada akhirnya akan mengarah pada ketidakstabilan keuangan dunia.

c. Jaminan Sosial Sebagai Perlindungan Terhadap Dampak Ekonomi Global

Diperlukan suatu sistem jaminan sosial untuk mengimbangi kekuatan pasar dalam suatu ekonomi global. ILO (Organisasi Buruh Internasional) telah mengakomodasi kebutuhan ini dengan menghimbau agar jaminan sosial diberikan terutama kepada mereka yang lemah, miskin dan tak berdaya, termasuk para pekerja informal

³¹ John Maynard Keynes, *Critical Assesment: Second Series*, ed. John Cunningham Wood (London: Routledge, 1994), 473.

dan keluarganya sehingga mereka dapat menjalani hidup sosialnya dengan baik.³²

d. Penghapusan Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan tingkat ekonomi dan sosial tidak hanya tampak di antara individu tetapi juga dapat dilihat secara lebih luas dalam cakupan wilayah dan negara. Situasi ini tampak nyata di negara-negara berkembang terutama negara-negara di Asia dan Afrika yang telah kehilangan jaringan dengan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat dijumpai di wilayah-wilayah tertentu sehingga pemerataan kesejahteraan tidak sungguh terjadi. Kekuatan ekonomi di negara berkembang telah jauh tertinggal dibanding dengan negara maju sehingga memunculkan berbagai masalah kemanusiaan. Perlu dihindarkan sikap yang memperlakukan beberapa negara atau daerah sebagai obyek untuk mengeruk keuntungan.

e. Memperhitungkan Biaya Sosial dan Ekologis

Dampak sosial dan ekologis menjadi sangat besar karena tuntutan kebutuhan manusia yang berakibat pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Kalkulasi ekonomi modern harus memperhatikan ongkos sosial dan ekologi dari dinamika kegiatan ekonomi. Kegiatan bisnis tidak membebankan ongkos sosial dan ekologis pada negara, dan negara-negara maju tidak membebarkannya pada negara-negara berkembang. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk, semakin langkanya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, maka akan meningkat pula angka kemiskinan dan migrasi yang membawa permasalahan sosial seperti kriminalitas, diskriminasi dan sebagainya. Moltmann memandang sistem kapitalisme sebagai salah satu penyebab penderitaan yang membuat manusia berada di bawah tekanan rasa takut dan kecemasan sehingga mereka menjadi agresif dan bersikap tidak manusiawi terhadap sesamanya.³³

³² International Labour Organization, *Social Protection Floors for Social Justice and a Fair Globalization*, (Geneva: International Labour Office, 2011), 15.

³³ Bdk. Jürgen Moltmann, *The Future of Creation* (London: SCM Press. Ltd, 1979), 97.

f. Hukum Internasional yang Mengatur Penggunaan Sumber Daya Alam secara Wajar.

Keinginan para pelaku ekonomi untuk meningkatkan angka produksi tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Eksploitasi yang di luar batas akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem akan terganggu. Maka diperlukan suatu regulasi yang ketat untuk membatasi kegiatan ini dan dilengkapi dengan aturan yang mengikat sehingga tidak ada aktivitas eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Pada akhirnya keberhasilan perusahaan dalam dunia bisnis tidak hanya terletak pada penciptaan produk dan jasa yang disertai oleh manajemen yang baik, tetapi juga perlu diperhitungkan aspek etika yang harus mengiringi setiap aktivitas ekonomi. Untuk menunjang keberhasilannya, aktivitas ekonomi harus melibatkan tiga elemen yaitu (1) ekonomi itu sendiri, (2) politik dan (3) moralitas. Ekonomi melakukan tugasnya untuk menjamin adanya pertumbuhan (*growth*), politik menangani distribusi dan pemerataan kesejahteraan, dan moralitas yang menyediakan kesadaran normatif untuk menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi (*personal responsibility and accountability*). Ketimpangan yang terjadi dalam elemen-elemen ini akan menyebabkan masalah serius bagi ekonomi pasar. Kegagalan tiga elemen ini adalah buatan manusia dan dapat pula dikendalikan oleh manusia. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk membangun sebuah kerangka kerja yang memadai dalam hal ekonomi. Maka diperlukan suatu usaha untuk mengendalikan gerak kapitalisme pada jalur yang benar dan etis. Amartya Sen dalam hal ini berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh dengan memberi perhatian yang besar kepada etika dan bahwa studi etika dapat bermanfaat apabila berelasi pula secara dekat dengan ekonomi.³⁴ Etika global yang ditawarkan Hans Küng harus menjadi titik simpul yang menawarkan stimulus moral minimal yang harus dijalankan oleh dunia untuk mengatasi persoalan global. Etika yang ditawarkan ini berkaitan

³⁴ Amartya Sen, *On Ethics and Economics* (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1987), 89.

dengan aspek politik, ekonomi dan agama yang bermuara pada suatu konsesus bersama.

Penutup

Etika pada akhirnya tidak hanya menyumbangkan seruan moral tetapi juga mengarah pada tindakan moral. Segala tegangan yang muncul dalam krisis ekonomi diharapkan dapat menciptakan tekanan yang memaksa pihak yang berwenang untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda politik, karena seruan moral di atas hanya memiliki pengaruh yang terbatas apabila tidak dikombinasikan dengan tindakan politik. Deklarasi atau manifesto untuk mewujudkan etika global dalam bidang ekonomi mutlak diperlukan dan menjadi anggaran dasar yang menjadi daya penggerak bagi para pelaku ekonomi. Proses ini melibatkan banyak pihak yang terdiri dari negara-negara, para pelaku bisnis, dan lembaga internasional non pemerintah lainnya yang berorientasi pada visi globalnya mewujudkan dunia yang lebih baik. Nilai yang harus dikembangkan dalam visi ini adalah semangat belas kasih (*compassion*), sikap saling menghormati satu sama lain (*respect*), dan sikap kepedulian kepada lingkungan (*care for nature*).

Proyek Etika Global yang diharapkan dapat menghasilkan konsensus fundamental ini mungkin terasa sulit dalam pelaksanaannya dan bukannya tidak mungkin akan menimbulkan keputusan, bahkan menganggapnya sebagai upaya *wishful thinking* belaka. Namun demikian, suara kenabian harus terus dikumandangkan dan dengan penuh harapan hendak mencapai perubahan yang memang harus diupayakan. Segala usaha yang dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan kehancuran kemanusiaan akan tetap lebih baik daripada mengobati segala penderitaan. Semoga kesadaran dan upaya ini menjadi daya preventif yang efektif untuk menangkal bahaya kehancuran ekonomi yang membawa penderitaan bagi manusia dan dunia pun siap menghadapi globalisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

====0000=====

DAFTAR PUSTAKA

- Basri Faisal H., 2002, "Globalisasi dan Tantangan Dunia Usaha", Mohammad Ikhsan, Chris Maining, Hadi, Soesastro (Ed.), *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Bottomore, Tom & Brym, Robert J., 1989, *The Capitalist Class: An International Study*, London: Harvester Wheatsheaf
- Dussel, Enrique, 2013, *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion* (London: Duke University Press)
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and The Last Man*, New York: The Free Press
- Fransiskus, 2015, *Evangelii Gaudium (Sukacita Injil)*, terj. Adisusanto dan Prasasti Bernadeta H., Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia
- Giddens, Anthony, 2001, *Sociology*, Cambridge: Polity Press
- Hansen, Donald A., 1976, *An invitation to Critical Sociology*, New York: The Free Press
- International Labour Organization, 2011, *Social Protection Floors for Social Justice and a Fair Globalization*, Geneva: International Labour Office
- Kammer, Charles L., 1988, *Ethics and Liberation: An Introduction*, New York: Orbis Books
- Küng, Hans, 1997, *A Global Ethic for Global Politics and Economics*, New York: Oxford University Press, Inc.
- Küng, Hans & Kuschel, Karl Joseph, 1993, *A Global Ethic - The Declaration of the Parliament of the World's Religions*, London: SCM Press Ltd.
- Keynes, John Maynard, 1994, *Critical Assesment: Second Series*, ed. John Cunningham Wood, London: Routledge
- Luhmann, Niklas, 1995, *Social System* California: Stanford niversity Press
- Moltmann, Jürgen, 1979, *The Future of Creation*, London: SCM Press. Ltd.
- Offam International,
(<https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016->

01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report)

- Sen, Amartya, 1987, *On Ethics and Economics*, Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Tawney, R.H., 2015, *Max Weber: Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus)
- Widiyanto, Agustinus Rachmat, 1992, "Titik Sentuh Ekonomi dan Etika", *Oratio Dies Natalis XXXVII Universitas Katolik Parahyangan-Januari 1992* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan)
- Widiyanto, Agus Rahmat, 1996. "Schumpeter: Kapitalisme sebagai Proses Penciptaan dan Pemunahan", *Melintas* No. 39 - Desember 1996, Bandung: Department of Philosophy Parahyangan Catholic University